



BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, surplus/defisit, Laporan Operasional, Aset, kewajiban, ekuitas.



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara memperoleh sumber daya ekonomi dan apakah alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh program dan kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat atas kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 13);



- s. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor);

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur disusun dan disajikan dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulis Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Bab III Ikhtisar Pencapaian kinerja Keuangan APBD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target kinerja keuangan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Laporan Realisasi Anggaran - LRA
- 4.2. Laporan Operasional – LO
- 4.3. Laporan Perubahan Ekutitas - LPE
- 4.4. Laporan Neraca
- 4.4. Catatan ata Laporan Keuangan - CaLK

Bab V Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup



BAB II
EKOMOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1. Ekonomi Makro

SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan dan sumber daya manusia.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Anggaran Pendapatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.20.710.000,00. Kondisi pendapatan terserap sebesar 41,42%.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Kebijakan Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun secara terukur dengan memperhatikan kaedah-kaedah perencanaan. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.916.384.583,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.223.622.264,00. Kondisi Belanja terserap sebesar 82,31%.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2021, rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA SKPD-Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021 yang terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3 Program dan Kegiatan SKPD

KODE PRO/ KEG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
<i>01.2.01</i>	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya jasa laporan capaian kinerja dan keuangan OPD
<i>01.2.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan
<i>01.2.06</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan kebersihan, alat tulis kantor, dan bahan computer
01.2.06.01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01.2.06.01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01.2.06.01	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
01.2.06.01	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
<i>01.2.08</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat
01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
01.2.08.04	Penyediaan jasa surat pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran
<i>01.2.09</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan
01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya
01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
<i>03.2.01</i>	<i>Pemangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	
03.2.01.01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Tersedianya gedung pasar dan sarana penunjang lainnya
<i>03.2.02</i>	<i>Pembinaan Terharap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya</i>	
03.2.02.01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Terbinanya organisasi pedagang kaki lima dan pedagang asongan
04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
<i>04.2.01</i>	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
04.2.01.03	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar



04.2.02	<i>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</i>	
04.2.01.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya
06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
06.2.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>	
06.2.01.01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang	Terlaksananya sidang tera, tera ulang peralatan UTTP
07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
07.2.01	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	
06.2.01.01	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota
06.2.01.03	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersedianya sistem jaringan dan informasi perdagangan, dan tersedianya database perdagangan
02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
02.2.01	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	
02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	Terbinanya dan tertatannya kelompok IKM, tercapainya pelayanan teknologi industri, penguatan kapasitas kelompok IKM, dan terfasilitasinya industry kecil dan menengah



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA.2021.

3.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Ikhtisar Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2021	%	REALISASI 2020 (AUDITED)
4	PENDAPATAN	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00

3.1.2. Belanja

Realisasi belanja atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Ikhtisar Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2021	%	REALISASI 2020 (AUDITED)
5	BELANJA	3,916,384,583.00	3,223,622,264.00	82.31	2,356,375,138.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,916,384,583.00	3,223,622,264.00	82.31	2,356,375,138.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,691,809,838.00	1,594,866,497.00	94.27	1,409,269,989.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,037,671,745.00	1,021,335,767.00	98.43	947,105,149.00
5.1.4	Belanja Subsidi	1,079,903,000.00	500,420,000.00	46.34	-
5.1.5	Belanja hibah	107,000,000.00	107,000,000.00	100.00	-



Realisasi belanja atas program dan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 3.1.3. Realisasi program kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP0)	REALISASI (RP0)	%	SISA ANGGARAN (RP0)
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	2,237,212,083	2,126,269,902	95.04	110,942,181
012.01	Perenc., Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	24,990,000	24,989,000	100.00	1,000
012.0106	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24,990,000	24,989,000	100.00	1,000
012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,691,809,838	1,594,866,497	94.27	96,943,341
012.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1,644,409,838	1,547,946,497	94.13	96,463,341
012.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keu SKPD	47,400,000	46,920,000	98.99	480,000
012.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,555,345	98,517,945	99.96	37,400
012.04.01	Penyediaan komp instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,194,745	3,194,745	100.00	-
012.04.04	Penyediaan bahan logistik kantor	15,667,000	15,667,000	100.00	-
012.04.05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	8,093,600	8,093,600	100.00	-
012.04.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	600,000	600,000	100.00	-
012.04.08	Fasilitasi kunjungan tamu	8,000,000	8,000,000	100.00	-
012.04.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	63,000,000	62,962,600	99.94	37,400
012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373,210,000	360,489,870	96.59	12,720,130
012.06.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1,860,000	1,357,000	72.96	503,000
012.06.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39,000,000	28,182,870	72.26	10,817,130
012.06.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	332,350,000	330,950,000	99.58	1,400,000
012.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48,646,900	47,406,590	97.45	1,240,310
012.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	37,145,900	35,905,590	96.66	1,240,310
012.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	7,501,000	7,501,000	100.00	-
012.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4,000,000	4,000,000	100.00	-
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	28,701,000	27,974,800	97.47	726,200
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,900,000	3,900,000	100.00	-
03.2.0101	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	3,900,000	3,900,000	100.00	-
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	24,801,000	24,074,800	97.07	726,200
03.2.02.01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	24,801,000	24,074,800	97.07	726,200
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,364,311,500	784,721,900	57.52	579,589,600
04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36,420,000	36,418,400	100.00	1,600
04.2.0103	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	36,420,000	36,418,400	100.00	1,600
04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1,327,891,500	748,303,500	56.35	579,588,000
04.2.02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1,327,891,500	748,303,500	56.35	579,588,000
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	41,030,000	40,531,400	98.78	498,600
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan	41,030,000	40,531,400	98.78	498,600
06.2.0101	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang	41,030,000	40,531,400	98.78	498,600
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	19,450,000	18,450,000	94.86	1,000,000
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	19,450,000	18,450,000	94.86	1,000,000
07.2.0103	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	19,450,000	18,450,000	94.86	1,000,000
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	225,680,000	225,674,262	100.00	5,738
02.2.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	225,680,000	225,674,262	100.00	5,738
02.2.0105	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	225,680,000	225,674,262	100.00	5,738
	JUM LAH	3,916,384,583	3,223,622,264	82.31	692,762,319



3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum, tidak ada hambatan dan kendala yang dihadapi terkait pencapaian target yang telah ditetapkan. Meskipun setelah dilakukan refocusing anggaran untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, semua Program dan Kegiatan masih dapat dilaksanakan dengan baik, kecuali pada Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengendalian Harga dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Realisasi fisik untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut mencapai 100%, yaitu berupa gelar pasar murah bersubsidi di 19 Kecamatan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali/putaran, namun realisasi keuangannya hanya mencapai 56,35%. Penyebab yang merupakan hambatan dan kendalanya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Daya beli masyarakat yang belum membaik sebagai dampak pandemi COVID-19
- Pada beberapa titik/lokasi, banyak masyarakat dari desa-desa sekitarnya kesulitan mengakses/berpartisipasi pada kegiatan pasar murah bersubsidi ini karena jarak dan medan tidak mendukung
- Komoditi yang dijual pada gelar pasar murah dari jenis produk lokal yaitu, beras jagung, beras sorgum, dan seral sorgum tidak terlalu laku terjual disebabkan pola konsumsi masyarakat yang belum berubah.
- Penyedia/produsen minyak goreng lokal (kelapa) tidak sanggup menyediakan sesuai dengan target sehingga juga mengakibatkan banyak SILPA dari Belanja Subsidi sembako untuk Gelar Pasar Murah Bersubsidi Tahun 2021



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dengan basis Akrual yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.20.710.000,00 dari target sebesar Rp.50.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2021	%	REALISASI 2020 (AUDITED)
4	PENDAPATAN	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50,000,000.00	20,710,000.00	41.42	13,642,500.00
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	-
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	0.00	0.00	-

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 hanya mencapai 41,42% dari target disebabkan karena pelaksanaan sidang tera / tera ulang (STTU) peralatan UTTP yang merupakan sumber retribusi jasa usaha lainnya tidak bisa dilaksanakan pada titik-titik di Kecamatan seperti biasanya. Anggaran yang telah di-refocusing sebagai akibat dari pandemi COVID-19 hanya memungkinkan pelaksanaan sidang tera / tera ulang (STTU) peralatan UTTP dilakukan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Penerimaan dari retribusi pelayanan tera/tera ulang ini lebih banyak diperoleh dari tera/tera ulang tangki ukur mobil dan pompa ukur BBM yang dilaksanakan sesuai permintaan pihak ketiga (pemilik), baik di Flores Timur maupun di Sikka.

4.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.356.375.138,00 atau 97,96% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.223.622.2640,00. Rinciannya anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1.2 Realisasi Anggaran Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2021	%	REALISASI 2020 (AUDITED)
5	BELANJA	3,916,384,583.00	3,223,622,264.00	82.31	2,356,375,138.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,916,384,583.00	3,223,622,264.00	82.31	2,356,375,138.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,691,809,838.00	1,594,866,497.00	94.27	1,409,269,989.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,037,671,745.00	1,021,335,767.00	98.43	947,105,149.00
5.1.4	Belanja Subsidi	1,079,903,000.00	500,420,000.00	46.34	-
5.1.5	Belanja Hibah	107,000,000.00	107,000,000.00	100.00	-

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.223.622.2640,00 atau 82,31% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.906.384.583,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2,1 Realisasi Anggaran Belanja Operasi

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2021	%	REALISASI 2020 (AUDITED)
5.1	BELANJA OPERASI	3,916,384,583.00	3,223,622,264.00	82.31	2,356,375,138.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,691,809,838.00	1,594,866,497.00	94.27	1,409,269,989.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,037,671,745.00	1,021,335,767.00	98.43	947,105,149.00
5.1.4	Belanja Subsidi	1,079,903,000.00	500,420,000.00	46.34	-
5.1.5	Belanja Hibah	107,000,000.00	107,000,000.00	100.00	-

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.594.866.497,00 atau 94,27% dari anggaran sebesar Rp.1,691,809,838.00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
5.1.1	Belanja Pegawai	1,426,971,470.00	1,396,542,989.00	97.87	1,442,449,454.00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,354,466,470.00	1,324,039,989.00	97.75	1,361,893,454.00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	44,580,000	44,580,000.00	100.00	45,780,000.00
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	27,925,000	27,923,000.00	99.99	34,776,000.00

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.021.335.767,00 atau 98,43 % dari anggaran belanja sebesar Rp.1.037.671.745,00. Rinciannya sebagai berikut:



Tabel 4.1.2.1.2 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

5,1,2	Belanja Barang dan Jasa	1,037,671,745.00	1,021,335,767.00	98.43	947,105,149.00
5.1.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	127,932,995.00	127,457,145.00	99.63	68,757,424.00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	435,980,000.00	420,440,460.00	96.44	466,012,025.00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	95,300,000.00	95,300,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	1,500,000.00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,852,750.00	28,850,000.00	99.99	23,602,500.00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,501,000.00	7,501,000.00	100.00	4,030,000.00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	338,605,000.00	338,287,162.00	99.91	377,203,200.00

4.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL – LO

4.2.1 Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.20.710.000,00 dan Rp.13.642.500,00 adalah merupakan Pendapatan LO. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Pendapatan LO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2021	%	REALISASI 2020 (AUDITED)
7	PENDAPATAN - LO	50,000,000	20,710,000	41.42	13,642,500
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	50,000,000	20,710,000	41.42	13,642,500
7.1.1.	Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.2	Retribusi Daerah - LO	50,000,000	20,710,000	41.42	13,642,500

4.2.2 Beban – LO

4.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.594.866.497,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.1.409.269.989,00 atau mengalami kenaikan sebesar 13,17%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sbb:



Tabel 4.2.2.1 Beban Pegawai

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2021	TA 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1,408,385,277.00	1,324,039,989.00	6.37
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	139,561,220.00	44,580,000.00	213.06
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO	46,920,000.00	40,650,000.00	15.42
Jumlah Beban Pegawai LO	1,594,866,497.00	1,409,269,989.00	13.17

4.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.44.798.624,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.44.798.624,00 atau mengalami penurunan sebesar 49,28%.

Beban Barang dan Jasa merupakan beban yang mencatat konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, beban yang dipakai untuk memelihara dan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal, beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, dan beban atas barang dan jasa BOS. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2021	TA 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Bahan Pakai Habis	127,457,145.00	68,757,424.00	85.37
Beban Jasa Kantor	420,440,460.00	466,012,025.00	(9.78)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	95,300,000.00	6,000,000.00	1,488.33
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3,500,000.00	1,500,000.00	133.33
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,850,000.00	23,602,500.00	22.23
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,501,000.00	4,030,000.00	86.13
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	338,287,162.00	377,203,200.00	(10.32)
Jumlah Beban Barang dan Jasa LO	1,021,335,767.00	947,105,149.00	7.84

4.2.2.3. Beban Subsidi

Jumlah Beban Subsidi periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.500.420.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.0,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.3 Beban Subsidi

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2021	TA 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Subsidi kepada BUMN - LO	500,420,000.00	-	#DIV/0!
Beban Subsidi kepada BUMD - LO	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Subsidi LO	500,420,000.00	-	#DIV/0!

4.2.2.4. Beban Hibah



Jumlah Beban Hibah periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.107.000.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.0,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.4 Beban Hibah

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2021	TA 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO	-	-	#DIV/0!
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	107.000.000.00	-	#DIV/0!
Beban Subsidi kepada BUMN - LO	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Hibah - LO	107.000.000.00	-	#DIV/0!

4.2.2.5. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel 4.2.2.5 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2021	TA 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Penyusutan Alat Angkutan - LO	64.000.204.08	43.568.828.29	46.89
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur - LO	112.323.500.00	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	18.220.600.00	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Komputer - LO	5.676.750.00	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Bangunan Gedung - LO	378.033.497.68	365.425.747.68	3.45
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan - LO	83.692.381.00	103.392.702.25	(19.05)
Beban Penyusutan Bangunan Air - LO	12.123.863.44	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Instalasi - LO	10.000.384.62	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan - LO	5.617.500.00	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO	689.688.680.82	512.387.278.22	34.60

4.2.2.6. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 4.2.2.5 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2021	TA 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Penyusutan Bangunan Gedung - LO	378.033.497.68	365.425.747.68	3.45
Beban Penyusutan Monumen - LO	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Bangunan Menara - LO	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti - LO	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO	378.033.497.68	365.425.747.68	3.45



Tabel 4.2.2.5 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2021	TA 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan - LO	83,692,381.00	103,392,702.25	(19.05)
Beban Penyusutan Bangunan Air - LO	12,123,863.44	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Instalasi - LO	10,000,384.62	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan - LO	5,617,500.00	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan LO	111,434,129.06	103,392,702.25	7.78

4.2.3. Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.(3.892.600.944,82) dan Rp.(2.855.119.916,22 atau mengalami penurunan sebesar 36,34%.

4.2.4. Surplus / Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.(3.892.600.944,82) dan Rp.(2.855.119.916,22 atau mengalami penurunan sebesar 36,34%. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.3.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.18.239.666.935,56 dan Rp.23.403.578.920,00

4.3.2. Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.(3.892.600.944,82) dan Rp.(2.855.119.916,22. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.434.688.186,00.

4.3.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

4.3.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap



Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.3.3.3. Koreksi ekuitas lainnya

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi atas aset lancar berupa penyesuaian/reklasifikasi dari ekstrakompetible ke aset lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.434.688.186,00.

4.3.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.892.600.944,82 dan tahun 2020 sebesar Rp.0,00

4.3.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.18.239.666.935,56 dan Rp.23.403.578.920,00

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

4.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau per tanggal neraca.

4.4.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00

Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.4.3. Persediaan Rp 0,00

Merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00

4.4.4. Tanah Rp 3.600.000,00



Nilai aset tetap Tanah yang dimiliki SKPD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.3.600.000,00 dan Rp.3.600.000,00. Nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2018. dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.4 Aset Tetap Tanah

KODE REKENING	URAIAN	SALDO 2021 (UNAUDITED)	SALDO 2020 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1.3.1	TANAH				
1.3.1.01	Tanah Persil	-	-	-	-
1.3.1.02	Tanah Non Persil	-	-	-	-
1.3.1.03	Lapangan'	-	-	-	-
1.3.1.61	Tanah Perkampungan	-	-	-	-
1.3.1.62	Tanah Pertanian	-	-	-	-
1.3.1.63	Tanah Perkebunan	-	-	-	-
1.3.1.66	Kolam Ikan	-	-	-	-
1.3.1.71	Tanah Untuk Bangunan Gedung	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-
1.3.1.73	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	-
	JUMLAH	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-

Mutasi nilai aset tetap Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	3,600,000		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN			
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak LanjutLHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH			
MUTASI +/-			
SALDO AKHIR	3,600,000		

Berdasarkan KIB A, saldo aset tetap Tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.600.000,00. Tidak ada mutasi penambahan/pengurangan.

4.4.5. Peralatan dan Mesin

Rp 2.057.246.150,00

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.2.057.246.150,00 dan Rp.2.766.168.540,00. Rinciannya sebagai berikut:



Tabel 4.4.5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	PERALATAN DAN MESIN	SALDO 2021 (UNAUDITED)	SALDO 2020 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1.3.2.01	ALAT-ALAT BERAT - ALAT BESAR				
1.3.2.01.01	Alat-Alat Besar Darat	-	-	-	-
1.3.2.01.02	Alat-Alat Besar Apung	-	-	-	-
1.3.2.01.03	Alat Bantu	-	-	-	-
1.3.2.02	ALAT-ALAT ANGKUTAN				
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	1,068,674,000.00	1,083,674,000.00	(15,000,000)	-
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-
1.3.2.02.06	Alat Angkut Apung Bermotor	-	-	-	-
1.3.2.02.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-	-	-	-
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN UKUR				
1.3.2.03.09	Alat Bengkel Bermesin	17,725,000.00	116,725,000.00	(99,000,000)	-
1.3.2.03.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	62,725,000.00	62,725,000.00	-	-
1.3.2.03.11	Alat Ukur	490,030,000.00	501,030,000.00	(11,000,000)	-
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN				
1.3.2.04.12	Alat Pengolahan	-	-	-	-
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1.3.2.05.13	Alat Kantor	109,553,220.00	109,553,220.00	-	-
1.3.2.05.14	Alat Rumah Tangga	147,803,930.00	516,434,320.00	(368,630,390)	-
1.3.2.05.15	Komputer	148,535,000.00	211,168,000.00	(62,633,000)	-
1.3.2.05.16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12,200,000.00	12,200,000.00	-	-
1.3.2.06	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI				
1.3.2.06.17	Alat Studio	-	-	-	-
1.3.2.06.18	Alat Komunikasi	-	-	-	-
1.3.2.06.19	Peralatan Pemancar	-	-	-	-
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM				
1.3.2.08.20	Unit-unit Laboratorium	-	-	-	-
1.3.2.08.21	Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	-	-
1.3.2.08.22	Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	-	-
1.3.2.08.23	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-	-
1.3.2.08.24	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumensasi	-	-	-	-
1.3.2.08.25	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	-	-	-	-
1.3.2.15	ALAT SAR				
1.3.2.15.48	Alat Pendukung Pencarian	-	152,659,000.00	(152,659,000)	-
	JUMLAH	2,057,246,150.00	2,766,168,540.00	(708,922,390)	

Mutasi nilai aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	2,766,168,540		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	708,922,390	(708,922,390)
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	-	708,922,390	(708,922,390)
MUTASI +/-	(708,922,390)		
SALDO AKHIR	2,057,246,150		

Saldo akhir aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.057.246.150,00. Mengalami mutasi berkurang sebesar Rp.708.922.390,00 yang merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-Lain karena rusak berat dan tidak ditemukan



4.4.6. Gedung dan Bangunan

Rp 18.901.674.884,00

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.18.901.674.884,00 dan Rp.18.271.287.384,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4.6 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO 2021 (UNAUDITED)	SALDO 2020 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1. BANGUNAN GEDUNG				
Bangunan Gedung Tempat Kerja	18,901,674,884.00	18,271,287,384.00	630,387,500	3.45
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-
2. MONUMEN				
Bangunan Sejarah	-	-	-	-
Tugu Peringatan	-	-	-	-
Monumen / Bangunan Bersejarah	-	-	-	-
Rambu-Rambu	-	-	-	-
Candi / Tugu Peringatan / Prasasti	-	-	-	-
Tugu / Titik Kontrol Past	-	-	-	-
JUMLAH	18,901,674,884.00	18,271,287,384.00	630,387,500	3.45

Mutasi nilai aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	18,271,287,384		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabe	-	-	-
Pindah antar Aset	630,387,500	-	630,387,500
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak LanjutLHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabe	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	630,387,500	-	630,387,500
MUTASI +/-	630,387,500		
SALDO AKHIR	18,901,674,884		

Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.18.901.674/844,00. Mengalami mutasi bertambah sebesar Rp. 630.387.500,00 yang merupakan pindah antar aset dari Aset Lain-Lain. Pada Laporan Barang Inventaris tahun 2020 mencatat 1 (satu) bangunan pasar yang masih dalam kondisi baik ke dalam Aset Lainnya, dan per 31 Desember 2021 dilakukan mutasi pindah antar aset

4.4.7. Jalan Irigasi dan Jaringan

Rp 1.479.096.660,00

Nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.1.479.086.660,00 dan Rp.1.479.086.660,00 Rinciannya sebagai berikut:



Tabel 4.4.7 Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

NO	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	SALDO 2021 (UNAUDITED)	SALDO 2020 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1	JALAN DAN JEMBATAN				
	Jalan	836,923,810.00	836,923,810.00	-	-
	Jembatan	-	-	-	-
2	BANGUNAN AIR / IRIGASI				
	Bangunan Air Irigasi	81,000,000.00	81,000,000.00	-	-
	Bangunan Air Pasang Surut	-	-	-	-
	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	-
	Bangunan Air Bersih/Baku	111,772,850.00	111,772,850.00	-	-
3	INSTALASI				
	Instalasi Air Minum/Air Bersih	-	-	-	-
	Instalasi Air Kotor	-	-	-	-
	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	-	-	-	-
	Instalasi Pembangkit Listrik	288,900,000.00	288,900,000.00	-	-
	Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	-
4	JARINGAN				
	Jaringan Air Minum	-	-	-	-
	Jaringan Listrik	160,500,000.00	160,500,000.00	-	-
	JUMLAH	1,479,096,660.00	1,479,096,660.00	-	-

Mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	1,479,096,660		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	1,479,096,660		

Saldo akhir aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.479.096.660,00. Tidak mengalami mutasi penambah dan mutasi pengurang

4.4.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp (5.072.751.025,26)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.(5.072.751.025,26,00) dan Rp.(4.992.277.834,44) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.



4.4.9. Aset Lain-Lain

Rp 946.711.226,00

Nilai Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.946.711.226,00 dan Rp.694.789.186,00 atau mengalami kenaikan sebesar 36,26%. Aset Lain-Lain ini merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak lagi dipergunakan untuk operasional kantor tetapi belum diusulkan pemutihan/penghapusan sehingga dilakukan reklasifikasi.

Rinciannya adalah reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.722.698.390, reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.174.807.251, dan reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.58.205.585

4.4.10. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Rp 0,00

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan kontra Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain.

4.4.11. Ekuitas

Rp 18.239.666.935,56

Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.18.239.666.935,56 dan Rp.23.403.578.920,00, mengalami penurunan sebesar Rp.5.163.911,984,44. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

4.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di:

- Jalan : San Juan
- Nomor : 210
- Telepon : (0383) 21271
- Fax. : (0383) 21271

Dasar pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur berdasarkan Perda Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur di pimpin oleh Siprianus Sina Ritan, S.Sos.M.Si sesuai Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKPP.821.01/02/PKM/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Tahun Anggaran 2021, SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga tenaga Non PNS yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II					-	1	1
2	III	-	-	-	-	3	1	4
3	IV			1	2	6		9
4	Non Eselon	-	-	3	1	4	-	8
	Jumlah PNS	-	-	4	3	13	2	22
5	Honorer	2	3	12	4	8		29
	Total Pegawai	2	3	16	7	21	2	51

Tabel 5.2 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					Jumlah PNS	Honorer
		I	II	III	IV			
1	S2	-			2	2		
2	S1	-	-	12	2	14	8	
3	Diploma	-	-	3	-	3	4	
4	SMA	-	1	3	-	4	12	
5	SMP	-	-	-	-	-	3	
6	SD	-				-	2	
	Jumlah PNS	-	1	18	4	23	-	
	Honorer						29	
	Total Pegawai	-	1	18	4	23	52	



Tabel 5.3 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	-	-	1	2	6	2	11
2	Perempuan	-	-	3	1	7		11
	Jumlah PNS	-	-	4	3	13	2	22
3	Honorer Laki Laki	2	3	7	3	5		20
4	Honorer Perempuan			5	1	3		9
	Honorer	2	3	12	4	8	-	29
	Total Pegawai	2	3	16	7	21	2	51



BAB VI PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan bahwa rencana-rencana strategis yang ditetapkan tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan pandemic covid-19 yang memaksa pemerintah harus melakukan refocusing anggaran untuk mendukung percepatan penanganan covid-19 dan dampaknya.

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan kondisi objektif, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan di periode berikutnya.

Larantuka, 04 Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur,

Siprianus Sina Ritan, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701231 199903 1 056